

Determinan Kinerja Manajerial Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa

Novi Darmayanti^{1*}, Dewi Kusmayasari², Amanda Friska Novita Sari³

¹⁻³ Universitas Islam Darul ‘Ulum Lamongan

*Corresponding email: novidarmayanti@unisda.ac.id, dewikusmayasari@unisda.ac.id,
amandafriska817@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja manajerial pemerintah desa, dengan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarakan kepada perangkat desa di Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Populasi penelitian terdiri dari 144 perangkat desa, sedangkan 60 responden dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan mengambil tiga responden dari masing-masing dua puluh desa. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dan Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial pemerintah desa. Selain itu, tata kelola pemerintahan yang baik memperkuat pengaruh pengelolaan dana desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja manajerial, namun tidak memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan kinerja manajerial. Temuan ini mengimplikasikan bahwa penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dapat meningkatkan kinerja manajerial desa melalui pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Kata kunci: akuntabilitas; partisipasi masyarakat; tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); kinerja manajerial; pengelolaan dana desa.

Abstract

This study aims to analyze the effect of village fund management, transparency, accountability, and community participation on the managerial performance of village governments, with good governance acting as a moderating variable. The study employed a quantitative approach using primary data collected through questionnaires distributed to village officials in Kalitengah District, Lamongan Regency. The research population consisted of 144 village officials, while 60 respondents were selected using purposive sampling by selecting three respondents from each of the twenty villages. Data were analyzed using multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA). The findings indicate that village fund management, transparency, accountability, and community participation positively influence the managerial performance of village governments. Furthermore, good governance strengthens the influence of village fund management, transparency, and community participation on managerial performance but does not moderate the relationship between accountability and managerial performance. These findings imply that implementing good governance principles can improve village managerial performance through transparent, accountable, and participatory village financial management.

Keywords: *accountability; community participation; good governance; managerial performance; village fund management.*

PENDAHULUAN

Pemerintah desa memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya dan keuangan desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat adalah melalui alokasi Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkuat pemberdayaan masyarakat desa. Kondisi tersebut menuntut pemerintah desa untuk memiliki kinerja manajerial yang baik agar pengelolaan dana desa dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang diterima, tetapi juga oleh kemampuan aparatur desa dalam menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan prinsip transparansi,

akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala seperti rendahnya kualitas pelaporan keuangan, keterbatasan kompetensi aparatur desa, kurangnya keterbukaan informasi, serta belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun pengawasan pembangunan desa. Kondisi tersebut berpotensi menurunkan kualitas kinerja manajerial pemerintah desa.

Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan terdiri atas 20 desa dengan karakteristik yang berbeda, baik dari sisi luas wilayah maupun besaran alokasi dana desa. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya variasi kebutuhan pembangunan serta kompleksitas pengelolaan keuangan desa. Semakin besar dana yang dikelola, semakin tinggi pula tuntutan terhadap kemampuan manajerial aparatur desa dalam menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan desa. Oleh karena itu, implementasi prinsip *good governance* menjadi faktor penting dalam memastikan pengelolaan dana desa berjalan secara efektif dan akuntabel.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang belum konsisten mengenai pengaruh pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja manajerial pemerintahan desa. Sebagian penelitian menemukan bahwa keempat variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial, sedangkan penelitian lainnya menunjukkan bahwa beberapa variabel belum memberikan pengaruh yang signifikan. Inkonsistensi hasil tersebut mengindikasikan adanya faktor lain yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antarvariabel. Dalam penelitian ini, *good governance* diposisikan sebagai variabel moderasi karena dipandang mampu memperkuat implementasi transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja manajerial pemerintahan desa serta menguji peran *good governance* sebagai variabel moderasi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan.

LANDASAN TEORI

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan dana desa yang baik menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Permatasari (2021), keberhasilan Program Dana Desa tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi juga dari efektivitas pengelolaannya dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, Makromah et al. (2025) menyatakan bahwa tahap perencanaan merupakan fondasi utama dalam pengelolaan dana desa karena menentukan ketepatan pelaksanaan program pembangunan. Pendapat tersebut diperkuat oleh Alam (2023) yang menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang efektif mampu mempercepat pembangunan desa dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan Stewardship Theory, aparatur desa sebagai *steward* memiliki tanggung jawab mengelola sumber daya publik demi kepentingan masyarakat. Pengelolaan dana desa yang dilakukan secara efektif akan meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan

evaluasi program sehingga berdampak pada meningkatnya kinerja manajerial pemerintahan desa. Hasil penelitian Permatasari (2021) dan Alam (2023) menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa yang baik memberikan dampak positif terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.

H1: Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa.

Transparansi

Menurut Lubis (2022), transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam menyediakan informasi mengenai pengelolaan keuangan desa sehingga dapat diakses dan diawasi oleh masyarakat. Transparansi menjadi salah satu prinsip utama *good governance* karena meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah desa.

Selanjutnya, Sososutiksno (2023) menjelaskan bahwa transparansi memiliki pengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan dana desa. Hal ini diperkuat oleh Hanif et al. (2026) yang menyatakan bahwa transparansi anggaran merupakan pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Pengembangan Hipotesis

Semakin tinggi tingkat transparansi pemerintah desa, semakin besar kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi tersebut mendorong aparatur desa bekerja lebih profesional sehingga mampu meningkatkan kinerja manajerial.

H2 : Transparansi berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa.

Akuntabilitas

Menurut Dewi Kusmaya (2021), akuntabilitas merupakan kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada masyarakat dan pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Darmayanti et al. (2024) menjelaskan bahwa tata kelola yang baik melalui peningkatan akuntabilitas akan menghasilkan laporan keuangan yang lebih berkualitas. Pendapat tersebut didukung oleh Maaidah dan Darmayanti (2024) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas meningkatkan efisiensi dan kualitas pelaporan keuangan.

Pengembangan Hipotesis

Akuntabilitas yang tinggi mencerminkan tanggung jawab aparatur desa dalam mengelola anggaran secara efektif dan sesuai dengan peraturan. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat akuntabilitas maka semakin baik pula kinerja manajerial pemerintahan desa.

H3: Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Shagita dan Indriani (2024), partisipasi masyarakat merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan dana desa.

Penelitian Yanti et al. (2023) menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memberikan kontribusi positif terhadap pengelolaan keuangan desa. Hasil serupa juga ditemukan oleh Setyaningrum et al. (2024) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan *good governance*.

Pengembangan Hipotesis

Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, semakin baik kualitas kebijakan yang dihasilkan sehingga kinerja manajerial aparatur desa juga meningkat.

H4: Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa.

Good Governance

Menurut Nurjannah et al. (2025), *good governance* merupakan penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan kepatuhan terhadap peraturan dalam pengelolaan keuangan desa.

Suhardi (2023) menjelaskan bahwa penerapan prinsip *good governance* meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana desa. Selain itu, Rayyan (2025) dan Putri (2025) menyatakan bahwa *good governance* memperkuat praktik transparansi dan akuntabilitas sehingga tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif.

Pengembangan Hipotesis

Penerapan *good governance* diperkirakan memperkuat hubungan antara pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dengan kinerja manajerial pemerintahan desa. Tata kelola yang baik akan meningkatkan efektivitas setiap proses pengelolaan pemerintahan sehingga dampak variabel independen terhadap kinerja manajerial menjadi lebih kuat.

H5: *Good Governance* memperkuat pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa.

H6: *Good Governance* memperkuat pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa.

H7: *Good Governance* memperkuat pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa.

H8: *Good Governance* memperkuat pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa.

Gambar, Tabel, dan Persamaan Matematis

Tabel 1. Analisis Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	td. Deviation
Pengelolaan Dana Desa (X1)	60	28	40	39,00	2,379
Transparansi (X2)	60	27	40	38,68	2,678
Akuntabilitas (X3)	60	28	40	38,93	2,400
Partisipasi Masyarakat (X4)	60	28	40	38,82	2,684
Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa (Y)	60	29	40	37,32	3,100
Good Governance (Z)	60	29	40	37,53	3,218

Sumber: *Output SPSS Versi 32, data diolah (2026)*

Secara keseluruhan, seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi dan standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-rata. Hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden cenderung homogen dan memberikan penilaian yang positif terhadap pengelolaan Dana Desa, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, penerapan *Good Governance*, serta kinerja manajerial pemerintahan desa.

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Jumlah Item	Nilai Corrected Item-Total Correlation	r table	Ket.
Pengelolaan Dana Desa (X1)	8	0,385 – 0,877	0,254	Valid
Transparansi (X2)	8	0,379 – 0,785	0,254	Valid
Akuntabilitas (X3)	8	0,364 – 0,888	0,254	Valid
Partisipasi Masyarakat (X4)	8	0,534 – 0,832	0,254	Valid
Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa (Y)	8	0,327 – 0,735	0,254	Valid
Good Governance (Z)	8	0,331 – 0,734	0,254	Valid

Sumber: Output SPSS Versi 32, data diolah (2026)

Tabel 3. Uji Reliabilitas

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas
Pengelolaan Dana Desa (X1)	8	0,927	$\geq 0,70$
Transparansi (X2)	8	0,927	$\geq 0,70$
Akuntabilitas (X3)	8	0,927	$\geq 0,70$
Partisipasi Masyarakat (X4)	8	0,927	$\geq 0,70$

Sumber: Output SPSS Versi 32, data diolah (2026)

Diketahui bahwa nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,927. Nilai tersebut lebih besar dari kriteria minimum sebesar 0,70, sehingga seluruh item pernyataan dalam instrumen penelitian dinyatakan sangat reliabel.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Objek penelitian adalah pemerintah desa di Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan. Populasi penelitian berjumlah 144 aparatur desa yang berasal dari 20 desa. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu memilih tiga responden pada setiap desa yang terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, dan kaur keuangan atau perangkat desa yang terlibat langsung

dalam pengelolaan dana desa, sehingga diperoleh 60 responden sebagai sampel penelitian. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner menggunakan skala Likert lima poin.

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri atas Pengelolaan Dana Desa (X_1), Transparansi (X_2), Akuntabilitas (X_3), dan Partisipasi Masyarakat (X_4). Variabel dependen adalah Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa (Y), sedangkan Good Governance (Z) berperan sebagai variabel moderasi.

Analisis data dilakukan menggunakan program IBM SPSS Statistics. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi (R^2), uji F, uji t, serta Moderated Regression Analysis (MRA) untuk menguji pengaruh variabel moderasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini melibatkan 60 aparatur pemerintah desa di Kecamatan Kalitengah, Kabupaten Lamongan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, data diuji melalui uji kualitas instrumen dan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi memenuhi persyaratan analisis.

Analisis Statistik Deskriptif

Hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa seluruh variabel penelitian memiliki nilai rata-rata yang relatif tinggi. Variabel Pengelolaan Dana Desa memperoleh nilai mean sebesar 39,00, Transparansi sebesar 38,68, Akuntabilitas sebesar 38,93, Partisipasi Masyarakat sebesar 38,82, Good Governance sebesar 37,53, dan Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa sebesar 37,32. Standar deviasi setiap variabel lebih kecil dibandingkan nilai rata-ratanya sehingga menunjukkan bahwa jawaban responden relatif homogen dan mencerminkan persepsi yang positif terhadap seluruh variabel penelitian.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, Good Governance, dan Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation lebih besar daripada r tabel (0,254). Dengan demikian, seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya, hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,927 atau lebih besar dari batas minimum 0,70 sehingga seluruh variabel dinyatakan sangat reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi telah memenuhi seluruh persyaratan analisis. Hasil uji normalitas berdasarkan Histogram dan Normal P-P Plot memperlihatkan bahwa residual menyebar mengikuti distribusi normal. Uji multikolinearitas menunjukkan seluruh variabel memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan nilai Variance Inflation Factor (VIF) di bawah 10 sehingga tidak terjadi multikolinearitas. Selain itu, hasil uji heteroskedastisitas memperlihatkan pola penyebaran titik residual yang acak dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh positif terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa. Nilai koefisien regresi Pengelolaan Dana Desa sebesar 0,291, Transparansi sebesar 0,312, Akuntabilitas sebesar 0,337, dan Partisipasi Masyarakat sebesar 0,293. Seluruh koefisien bernilai positif yang menunjukkan bahwa peningkatan pada masing-masing variabel akan meningkatkan Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa.

Nilai Adjusted R Square sebesar 0,654 menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat mampu menjelaskan variasi Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa sebesar 65,4%, sedangkan sisanya sebesar 34,6% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Pengujian Hipotesis

Hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa ($\beta = 0,291$; $t = 4,333$; $p < 0,001$), sehingga Hipotesis 1 diterima. Transparansi juga berpengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0,312$; $t = 3,973$; $p < 0,001$), sehingga Hipotesis 2 diterima. Akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan ($\beta = 0,337$; $t = 5,142$; $p < 0,001$), sehingga Hipotesis 3 diterima. Demikian pula Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa ($\beta = 0,293$; $t = 4,767$; $p < 0,001$), sehingga Hipotesis 4 diterima.

Hasil uji simultan (uji F) menunjukkan nilai F sebesar 28,930 dengan tingkat signifikansi 0,000. Hasil ini membuktikan bahwa Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipasi Masyarakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa sehingga model penelitian dinyatakan layak digunakan.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Hasil Moderated Regression Analysis menunjukkan bahwa Good Governance berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara Pengelolaan Dana Desa, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa. Hal ini ditunjukkan oleh signifikansi variabel interaksi $X1 \times Z$ ($p = 0,015$), $X2 \times Z$ ($p = 0,025$), dan $X4 \times Z$ ($p = 0,030$). Sebaliknya, interaksi antara Akuntabilitas dan Good Governance ($X3 \times Z$) tidak signifikan ($p = 0,499$), sehingga Good Governance tidak mampu memoderasi pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa. Dengan demikian, Hipotesis 5, Hipotesis 6, dan Hipotesis 8 diterima, sedangkan Hipotesis 7 ditolak.

Pembahasan

Pengaruh Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kinerja manajerial pemerintahan desa. Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan sesuai tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban mendorong aparatur desa menjalankan fungsi manajerial secara lebih efektif. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan yang baik menjadi dasar bagi terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang berkualitas.

Temuan ini sejalan dengan *Stewardship Theory* yang menjelaskan bahwa aparatur pemerintah sebagai pengelola memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan sumber daya yang dipercayakan demi kepentingan masyarakat. Ketika dana desa dikelola secara efektif, aparatur desa mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta pencapaian tujuan pembangunan desa.

Pengaruh Transparansi terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa

Transparansi terbukti menjadi salah satu faktor yang mendukung peningkatan kinerja manajerial pemerintah desa. Keterbukaan informasi mengenai pengelolaan dana desa meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat pengawasan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penyediaan informasi yang mudah diakses membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih akuntabel dan mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan

desa. Dengan demikian, transparansi tidak hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas pelaksanaan pemerintahan desa.

Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa

Akuntabilitas memberikan pengaruh positif terhadap kinerja manajerial pemerintah desa. Aparatur desa yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara tepat akan meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Akuntabilitas juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintah desa menjalankan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan program pembangunan.

Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kinerja Manajerial Pemerintahan Desa

Partisipasi masyarakat berperan dalam meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi pembangunan memberikan informasi mengenai kebutuhan riil masyarakat sehingga kebijakan yang diambil menjadi lebih tepat sasaran.

Selain memperkuat fungsi pengawasan, partisipasi masyarakat juga meningkatkan legitimasi kebijakan pemerintah desa sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efektif.

Peran Good Governance sebagai Variabel Moderasi

Penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good governance* memperkuat hubungan antara pengelolaan dana desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja manajerial pemerintahan desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan, semakin besar kontribusi ketiga variabel tersebut dalam meningkatkan kinerja aparatur desa.

Sebaliknya, *good governance* tidak mampu memoderasi hubungan antara akuntabilitas dan kinerja manajerial. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas telah menjadi kewajiban administratif yang harus dilaksanakan oleh aparatur desa sehingga keberadaan *good governance* tidak memberikan tambahan pengaruh terhadap hubungan tersebut. Temuan ini konsisten dengan ringkasan hasil penelitian pada abstrak skripsi Anda.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat merupakan faktor yang berperan dalam meningkatkan kinerja manajerial pemerintahan desa. Penerapan prinsip-prinsip tersebut mendorong pengelolaan keuangan desa menjadi lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Selain itu, *good governance* berperan sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara pengelolaan dana desa, transparansi, dan partisipasi masyarakat terhadap kinerja manajerial pemerintahan desa. Namun demikian, *good governance* tidak memperkuat hubungan antara akuntabilitas dan kinerja manajerial pemerintahan desa. Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengelolaan dana desa, tetapi juga oleh penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya dilakukan pada pemerintah desa di Kecamatan Kalitengah sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada seluruh pemerintah desa di wilayah lain. Kedua, penelitian

menggunakan pendekatan kuantitatif melalui kuesioner sehingga informasi yang diperoleh bergantung pada persepsi responden. Ketiga, penelitian hanya menggunakan variabel pengelolaan dana desa, transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan *good governance*, sehingga masih terdapat faktor lain yang berpotensi memengaruhi kinerja manajerial pemerintahan desa.

Saran Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah penelitian agar hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian berikutnya dapat menambahkan variabel lain seperti kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, komitmen organisasi, budaya organisasi, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan metode *mixed methods* atau wawancara mendalam juga dapat dipertimbangkan agar memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja manajerial pemerintahan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmayanti, N., Nashrullah, M. H., Irawan, M. R. N., Hardianto, A. M., & Sari, G (2024). Evaluating financial stability and governance in financial reporting: Evidence from consumer goods industry. *International Journal of eBusiness and eGovernment Studies*, 16(4), 42–60
<http://www.agbioforum.org/sobiad.org/menuscrypt/index.php/ijebe/article/view/2284>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia. Republik Indonesia. (2014).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2014). Alya Fitri Shagita, Rini Indriani (2024) : Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Pemerintah Desa Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu) : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah Vol 6 No 3
- Isnaini Anniswati Rosyida, Have Zulkarnaen, Rika Dwi Cahyani (2025). : Pengaruh Akuntabilitas Publik, Transparansi Laporan Keuangan Dan Komitmen Organisasi Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Partisipasi Masyarakat Sebagai Variabel Moderasi : Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Hlm 220-236
<https://repository.unisda.ac.id/4128/>
- Novi Darmayanti, Evinta Hogi Pratama, (2023). : Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan)
<https://ejournal.unisda.ac.id/index.php/profit/article/view/4940>
- Novi Darmayanti, A. Manaf Dientri, Radian Sri Rama, Salimatus Sa'diyah (2024) : The Influence Of Human Resource Competence, Application Of Governmental Accounting Standards And Regional Financial Accounting Systems On The Quality Of Local Government Financial Reports (Empirical Studies On The Government Of Lamongan And Tuban) : Humanis, Vo. 16, No. 1 <https://ejournal.unisda.ac.id/index.php/Humanis/article/view/5389>
- Dewi Kusmaya S (2021). *Accountability of cash-intensive on village funds*. Journal of Public Sector Accountability, 7(2), 45–58.
<https://repository.unisda.ac.id/1028/1/jurnal%20Budapest-1.pdf>
- Nurjannah, K. P., Rahman, A., & Syamsuddin, S. (2025). The effect of the implementation of good governance on village financial management. *Journal of Public Sector Management*, 16(1), 59–74